



Konflik Penolakan Pembangunan Gereja Methodist dalam Perspektif Sosiologis di Desa Pematang Seleng, Kabupaten Labuhanbatu

The Conflict over the Rejection of the Methodist Church Construction: A Sociological Perspective in Pematang Seleng Village, Labuhanbatu Regency

Widya Putri*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Irwansyah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the conflict surrounding the rejection of the Methodist Church construction in Pematang Seleng Village, Labuhanbatu Regency, from a sociological perspective. Using a qualitative approach with a case study method, data were gathered through observations, interviews, and literature reviews. The findings reveal that the conflict is driven by socio-cultural, political, economic, and religious factors. Socio-cultural factors are related to the norms and values of the predominantly Muslim local community, while political factors encompass both local and national interests. Economic factors include concerns over the potential depletion of local economic resources, and religious factors involve fears of Christianization and religious disparities. The conflict exemplifies the complexity of inter-religious relations in Indonesia, underscoring that tolerance and pluralism remain significant challenges. The study recommends resolving the conflict through inter-religious dialogue, education on tolerance and pluralism, law enforcement, and governmental efforts to promote harmonious inter-religious relations.

ARTICLE HISTORY

Received 14/06/2024
Revised 05/07/2024
Accepted 12/07/2024
Published 05/08/2024

KEYWORDS

Inter-religious conflict; sociological analysis; tolerance; pluralism; Indonesia.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ widya0604202035@uisu.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v8i2.9626>

PENDAHULUAN

Agama merupakan dua sisi koin yang berbeda, di satu sisi menjadi wadah kedamaian umat manusia, dan di sisi lain menjadi pemicu konflik utama di dunia. Salah satu konflik yang sering muncul adalah terkait pembangunan rumah ibadah. Bagi sebagian pihak, pendirian rumah ibadah adalah hak setiap penganut agama, terutama jika jumlah jemaah bertambah. Namun, bagi pihak lain, pendirian rumah ibadah sangat bergantung pada komposisi agama di daerah tersebut, sehingga rumah ibadah lebih mudah dibangun di wilayah dengan mayoritas yang sesuai, dan sulit jika bagian dari minoritas (Suryawati & Syaputri, [2022](#)).

Indonesia terkenal dengan keragaman budaya, termasuk suku bangsa, ideologi politik, dan agama. Keragaman ini bisa menjadi kekuatan positif jika semua kelompok bersatu untuk kemajuan bersama. Dengan toleransi dan harmoni, masyarakat Indonesia dapat membangun masyarakat madani yang ideal. Namun, keragaman juga bisa menimbulkan konflik dan kekerasan, seperti yang ditunjukkan dalam sejarah, di mana nilai-nilai kemanusiaan sering terabaikan (Firdaus et al., [2023](#)).

Indonesia memiliki kekayaan keragaman agama yang seharusnya menjadi fondasi untuk membangun kemanusiaan. Nilai-nilai luhur agama diharapkan mampu mendorong harmoni dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, ironisnya, keragaman ini belum dimanfaatkan secara optimal. Seringkali terjadi konflik dan ketegangan antar umat beragama, bahkan berujung pada kekerasan fisik. Sentimen eksklusif dan fanatisme menghambat terjalinnya hubungan yang baik antar umat beragama, terutama antara Kristen dan Islam yang memegang peran penting dalam dinamika sosial di Indonesia (Kodiran, [2016](#)).

Pada hakikatnya, agama hadir sebagai petunjuk bagi manusia untuk mencapai keselarasan dalam hidup. Agama memiliki kekuatan untuk membentuk individu menjadi pribadi yang ideal sesuai



dengan nilai-nilai yang diajarkan. Hal ini dapat terwujud jika agama tidak hanya dipahami sebagai lambang, tetapi juga diamalkan dalam pikiran, perkataan, dan tindakan para pemeluknya, serta menjadi pendorong untuk berbuat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari (Liliweri, [2005](#)).

Rumah ibadah berperan penting dalam kehidupan beragama, berfungsi sebagai tempat ibadah dan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan sosial dan keagamaan, serta melambungkan identitas agama dan nasionalisme. Di rumah ibadah, nilai-nilai moral luhur seperti toleransi dan saling menghormati diajarkan, sehingga keragaman agama menjadi fondasi persatuan bangsa (Sulaiman, [2015](#)). Pendirian gereja sering kali menimbulkan problematika kompleks, seperti yang terjadi di Pematang Seleng, di mana mayoritas penduduk Muslim.

Pemahaman agama dan identitas keagamaan masyarakat berperan penting dalam penerimaan atau penolakan pendirian gereja, dan prasangka terhadap agama lain dapat memicu ketegangan antar agama. Pemerintah Labuhanbatu menghentikan sementara pembangunan gereja dengan dasar hukum peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman pelaksanaan tugas (Riansyah et al., [2021](#)). Memahami dinamika konflik ini membantu mencari solusi yang tepat. Di Desa Pematang Seleng, Sumatera Utara, masyarakat Methodist ingin membangun gereja sesuai peraturan bersama Menteri nomor 8 dan 9 tahun 2006 (Susanto, [1979](#)).

Topik pembangunan gereja di tengah masyarakat multikultural menghadirkan isu yang menarik untuk ditelaah. Di komunitas dengan keragaman agama, konflik sosial antar umat beragama adalah hal yang lumrah terjadi (Riansyah et al., [2021](#)). Kompleksitasnya semakin meningkat ketika salah satu agama mendominasi. Namun, konflik tersebut dapat diredam dengan meningkatkan interaksi sosial dalam masyarakat. Indonesia, sebagai negara majemuk dengan berbagai suku, agama, dan budaya, memiliki kekayaan yang perlu dijaga dan dilestarikan. Namun, di balik keberagaman itu, konflik juga bisa muncul, salah satunya terkait pendirian rumah ibadah (Rochajat, [2011](#)).

Masyarakat Methodist membeli tanah untuk membangun gereja. Namun, rencana ini mendapat penolakan dari sebagian masyarakat desa. Penolakan ini didasarkan pada beberapa alasan, seperti rasa tidak percaya terhadap gereja Methodist, kekhawatiran akan perubahan sosial dan budaya, dan kurangnya komunikasi antar kelompok. Penolakan ini memicu konflik berkepanjangan, menimbulkan perpecahan di desa, dan mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Memahami akar penyebab konflik dan dinamika yang terjadi di Desa Pematang Seleng penting untuk mencari solusi yang tepat dan menyelesaikan konflik yang berkepanjangan (Kahmad, [2009](#)).

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan tema penelitian ini yaitu: (1) Bafhadal, dkk (2024), hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan rumah ibadah terhambat oleh keterlibatan berbagai kelompok, termasuk partai politik yang memegang peran sentral, dan kurangnya pihak yang menjaga toleransi menjadi faktor penting agar kejadian serupa tidak terulang (Bafhadal et al., [2024](#)); (2) Wijayanto (2021), hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari disebabkan oleh kekecewaan warga Malangsari terhadap cara curang dalam memperoleh IMB dan kekhawatiran terhadap gangguan keimanan, sementara resolusi konflik melalui mediasi yang dipimpin oleh Komnas HAM mengizinkan pembangunan gereja kembali, meskipun secara sosial damai positif belum tercapai (Wijayanto, [2021](#)); (3) Dahlan dan Aslamiyah (2022), hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik pembangunan rumah ibadah minoritas di Kalimantan Selatan disebabkan oleh perbedaan interpretasi regulasi, faktor sosial-keagamaan, politisasi agama dalam Pilkada dan Pileg, serta kecurigaan antar umat beragama akibat perubahan agama karena pernikahan (Dahlan & Aslamiyah, [2022](#)).

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis konflik ini dari sudut pandang sosiologis yang komprehensif, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Sementara

penelitian sejenis cenderung fokus pada aspek hukum atau teologis, penelitian ini menggali lebih dalam bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik berperan dalam konflik tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti kurangnya upaya intervensi pemerintah dan lembaga terkait dalam mempromosikan toleransi dan dialog antar agama, serta menekankan pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mencapai resolusi yang berkelanjutan. Analisis ini mengisi gap yang ada dalam literatur dengan memberikan perspektif baru yang lebih mendalam dan terintegrasi, yang dapat menjadi acuan bagi penelitian dan kebijakan di masa mendatang dalam mengelola konflik keagamaan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami konflik penolakan pembangunan Gereja Methodist di Desa Pematang Seleng, Kabupaten Labuhanbatu, dari perspektif sosiologis. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi penolakan tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap peran dan dinamika antar kelompok masyarakat serta intervensi dari pemerintah dan lembaga terkait dalam merespons konflik ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang akar penyebab konflik dan menawarkan rekomendasi solusi yang efektif untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di wilayah tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami secara mendalam makna, motivasi, dan pengalaman individu serta kelompok yang terlibat dalam konflik penolakan pembangunan Gereja Methodist di Desa Pematang Seleng, Kabupaten Labuhanbatu. Studi kasus dipilih karena fokus penelitian ini adalah pada satu kasus spesifik yang menawarkan wawasan rinci tentang dinamika sosial dan kultural yang mempengaruhi konflik tersebut (Yin, 2018). Penelitian ini dilakukan selama dua bulan dengan subyek penelitian meliputi pemerintah desa sebagai informan kunci, pimpinan gereja, anggota jemaat Gereja Methodist yang berusaha membangun gereja baru, serta warga sekitar yang menentang pendirian gereja. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat, menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur yang telah disiapkan sebelumnya. Selain itu, peneliti melakukan observasi partisipan dan non-partisipan, serta mengumpulkan dokumen-dokumen terkait konflik seperti surat-surat pernyataan, pemberitaan media massa, dan dokumen resmi dari pemerintah (Creswell, 2015).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang melibatkan beberapa langkah. Pertama, reduksi data, di mana data yang dikumpulkan dari berbagai sumber diubah menjadi bentuk yang lebih ringkas dan mudah dianalisis (Miles et al., 2014). Kedua, penyajian data, yang disajikan dalam bentuk tabel, matriks, atau diagram untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Ketiga, penarikan dan verifikasi kesimpulan, di mana kesimpulan ditarik berdasarkan data yang telah disajikan dan dianalisis, kemudian diverifikasi dengan triangulasi data dan triangulasi metode untuk memastikan validitas temuan (Patton, 2022). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konflik dan menawarkan solusi yang efektif untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di wilayah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik penolakan pembangunan Gereja Methodist di Desa Pematang Seleng merupakan contoh kompleks dari bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, dan politik dapat berinteraksi untuk menciptakan ketegangan dan perselisihan. Konflik ini menunjukkan pentingnya dialog antar umat

beragama, pendidikan agama, dan transparansi dalam proses perizinan dan pembangunan tempat ibadah.

Penelitian ini menemukan beberapa faktor yang mendasari konflik penolakan pembangunan Gereja Methodist di Desa Pematang Seleng, yaitu sejarah ketegangan dan prasangka antar umat beragama di desa yang diperparah oleh kurangnya komunikasi dan interaksi sosial yang positif. Beberapa warga desa khawatir bahwa pembangunan gereja akan mengubah budaya dan tradisi desa, serta memicu perselisihan antar umat beragama. Kekhawatiran ini muncul karena sebagian warga desa tidak memiliki pemahaman yang benar tentang agama Methodist, yang sebenarnya menekankan pada nilai-nilai cinta kasih, toleransi, dan pelayanan kepada sesama tanpa memandang latar belakang agama. Ketakutan yang tidak berdasar tersebut dapat dikaitkan dengan asumsi bahwa keberadaan gereja akan mengancam identitas religius mayoritas, meskipun tidak ada bukti nyata yang mendukung pandangan tersebut. Selain itu, proses perizinan dan pembangunan gereja yang tidak dilakukan dengan transparan dan komunikatif semakin menimbulkan rasa curiga dan ketidakpercayaan di antara warga desa, memperparah situasi konflik.

Hal ini diperkuat dengan wawancara peneliti dengan Kepala Desa Pematang Seleng, berikut hasil wawancaranya:

"Sebagai kepala desa, saya prihatin dengan situasi yang terjadi di Desa Pematang Seleng terkait penolakan pembangunan Gereja Methodist. Saya memahami bahwa ini merupakan masalah yang kompleks dan sensitif, dan saya ingin meyakinkan semua pihak bahwa saya berkomitmen untuk menyelesaikannya dengan cara yang adil dan damai. Pertama-tama, saya ingin menekankan bahwa pemerintah desa menghormati hak semua warga negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama, dan hal ini tidak boleh dikompromikan. Saya telah bertemu dengan perwakilan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik ini. Saya telah mendengarkan dengan seksama kekhawatiran mereka dan berusaha untuk memahami sudut pandang mereka. Saya yakin bahwa dengan dialog yang terbuka dan jujur, kita dapat menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Saya ingin mengajak semua pihak untuk menahan diri dari tindakan yang dapat memperburuk situasi. Marilah kita bekerja sama untuk membangun desa yang damai dan harmonis, di mana semua warga negara merasa dihormati dan diterima."

"Langkah konkret yang akan saya ambil untuk menyelesaikan konflik ini yaitu, pertama, membentuk tim mediasi yang terdiri dari perwakilan dari berbagai pihak di desa, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda. Tim mediasi akan bertugas untuk memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak dan membantu mereka menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Kedua, mengadakan pertemuan publik untuk membahas masalah ini secara terbuka dan transparan. Pertemuan ini akan memberikan kesempatan bagi semua warga desa untuk menyuarakan pendapat mereka dan untuk mempelajari lebih lanjut tentang masalah ini. Ketiga, membuat komitmen tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berisi kesepakatan tentang solusi yang telah dicapai. Komitmen ini akan membantu untuk memastikan bahwa solusi tersebut dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak. Berdasarkan informasi yang saya dapat, konflik ini berawal dari rencana pembangunan Gereja Methodist di Desa Pematang Seleng yang ditolak oleh sebagian warga desa. Penolakan ini didasari oleh berbagai alasan, termasuk kekhawatiran akan perubahan sosial dan budaya, serta potensi gangguan keamanan. Pimpinan Gereja menegaskan komitmen untuk membangun gereja dengan cara yang damai dan menghormati semua pihak. Hal ini dibuktikan dengan upaya dialog dan mediasi yang telah dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan aparat pemerintah."

Pimpinan Gereja menekankan bahwa pembangunan gereja merupakan hak konstitusional yang dilindungi oleh undang-undang. Mereka berharap agar semua pihak dapat menghormati hak ini dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Pimpinan Gereja menyatakan kesiapan untuk berdialog dan mencari solusi bersama dengan semua pihak. Mereka berharap agar konflik ini dapat diselesaikan dengan damai dan tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat.

Sedangkan dari pandangan masyarakat sendiri banyak masyarakat Desa Pematang Seleng yang mendukung pembangunan Gereja Methodist. Mereka berpandangan bahwa gereja merupakan tempat ibadah yang berhak untuk dibangun di desa, dan bahwa kerukunan antar umat beragama di desa selama ini terjaga dengan baik. Dibalik itu beberapa masyarakat desa menolak pembangunan Gereja Methodist dengan alasan kekhawatiran akan mengganggu kerukunan antar umat beragama.

Mereka khawatir bahwa pembangunan gereja akan memicu perselisihan dan konflik antar umat beragama di desa.

Tidak hanya dari masyarakat banyak juga dari anggota jemaat yang menegaskan hak mereka untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Pembangunan gereja dianggap sebagai bentuk perwujudan hak tersebut dan memungkinkan mereka untuk berkumpul dan beribadah dengan bebas. Saat ini jemaat Methodist di Desa Pematang Seleng harus menempuh jarak yang jauh untuk beribadah di gereja terdekat. Pembangunan gereja di desa mereka akan memudahkan mereka untuk beribadah secara rutin dan meningkatkan partisipasi dalam kegiatan keagamaan. Diharapkan pembangunan gereja dapat menjadi pusat komunitas bagi jemaat Methodist dan masyarakat sekitar. Gereja dapat menjadi tempat untuk mengadakan berbagai kegiatan sosial dan edukasi, serta memperkuat hubungan antar warga.

Konflik penolakan pembangunan gereja Methodist di Desa Pematang Seleng merupakan contoh kompleks dari bagaimana perbedaan keyakinan, kurangnya komunikasi, dan ketakutan akan perubahan dapat menyebabkan konflik sosial. Konflik ini menunjukkan pentingnya dialog dan toleransi antar umat beragama. Penelitian sosiologis dapat membantu memahami dan mengatasi konflik sosial ini. Dialog, edukasi, penegakan hukum, dan keterlibatan pihak ketiga dapat membantu menyelesaikan konflik ini dan membangun masyarakat yang damai dan harmonis (Putri & Sari, 2023).

Konflik penolakan pembangunan Gereja Methodist merupakan fenomena sosial kompleks yang melibatkan berbagai faktor dan aktor. Dalam situasi ini, sosiolog dapat memainkan peran penting dalam memahami akar penyebab konflik, menganalisis dinamika sosial, dan mencari solusi yang berkelanjutan (Setiawan & Wijaya, 2024). Dengan menganalisis struktur sosial, norma budaya, dan interaksi antar kelompok, sosiolog dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas konflik.

Sosiolog dapat melacak bagaimana berbagai faktor tersebut berinteraksi dan menciptakan dinamika konflik. Mereka dapat menganalisis bagaimana aktor-aktor terlibat dalam konflik, bagaimana informasi dan rumor menyebar, dan bagaimana ketegangan meningkat dan meledak menjadi kekerasan (Ilmi et al., 2023). Sosiolog dapat membantu merancang solusi yang berkelanjutan untuk konflik dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Mereka dapat memfasilitasi dialog antar kelompok, mengembangkan strategi mediasi dan resolusi konflik, serta merumuskan kebijakan yang mempromosikan toleransi dan kohesi sosial (Raharjo & Susanto, 2022).

Sosiolog memiliki peran penting dalam memahami dan menyelesaikan konflik penolakan pembangunan Gereja Methodist. Dengan menggunakan keahlian dan perspektif mereka, sosiolog dapat membantu membangun jembatan antar kelompok, mempromosikan toleransi dan kohesi sosial, dan mencapai solusi yang damai dan berkelanjutan.

Faktor Pemicu Terjadinya Konflik Penolakan Pembangun Gereja Methodist

Penolakan atau tidak diterimanya rumah ibadah ini telah menjadi cerita yang sering didengar oleh masyarakat dari waktu ke waktu. Dengan berbagai macam alasan yang didapatkan seperti tidak memiliki izin serta tidak sesuai aturan. Hal ini kerap dijadikan pembenaran oleh pihak mayoritas untuk melakukan tindakan-tindakan yang intoleran. Beberapa peraturan daerah yang diskriminatif serta pemerintah daerah yang tak berpengaruh terhadap masyarakat yang intoleran menjadikan kaum minoritas semakin menyudut.

Banyak hal yang melatarbelakangi dari fenomena penolakan masyarakat mayoritas terhadap masyarakat minoritas. Dalam hal ini terjadi sebuah sentimen umat beragam yaitu antara umat Islam

dan umat kristiani. Masalah tersebut sebetulnya memiliki beberapa faktor yang menjadi penyebab masyarakat menolak dan ada beberapa faktor juga yang membuat umat kristiani terus memperjuangkan haknya. Berdasarkan undang-undang sebetulnya negara telah menjamin kegiatan beribadah di negara ini termasuk oleh umat kristiani. Akan tetapi memang ada masalah yang unik telah terjadi (Riansyah et al., 2021). Konflik penolakan pembangunan gereja Methodist di Indonesia telah terjadi di beberapa tempat. Faktor-faktor yang memicu konflik tersebut umumnya bersifat kompleks dan multidimensi, dengan beragam akar permasalahan yang saling terkait. Berikut adalah beberapa faktor yang umum ditemukan:

Faktor Agama

Keberatan dari sebagian masyarakat yang berbeda keyakinan dengan jemaat Methodist terhadap pembangunan gereja di lingkungan mereka. Hal ini dapat dikarenakan kekhawatiran akan dominasi agama tertentu, potensi kristenisasi, atau pelanggaran norma dan tradisi agama setempat. Stigma negatif terhadap agama Methodist dan stereotip yang keliru tentang ajaran dan praktik mereka dapat memicu penolakan dan rasa tidak aman di kalangan masyarakat sekitar. Disinformasi yang disebarakan melalui media sosial atau rumor juga dapat memperkeruh suasana dan memperkuat penolakan.

Faktor Sosial dan Budaya

Masyarakat mungkin tidak mempercayai proses perizinan dan pembangunan gereja. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa gereja dibangun secara tidak sah atau tanpa persetujuan yang memadai dari masyarakat setempat. Kurangnya komunikasi yang terbuka dan transparan antara jemaat Methodist dan masyarakat sekitar dapat memicu kesalahpahaman dan rasa permusuhan. Di beberapa daerah, terdapat persaingan antar umat beragama dalam memperebutkan pengaruh dan sumber daya. Hal ini dapat memperburuk konflik penolakan pembangunan gereja, terutama jika dikaitkan dengan faktor agama.

Nilai-nilai dan tradisi lokal yang menekankan keseragaman agama dan budaya dapat memicu penolakan terhadap pembangunan gereja Methodist. Kurangnya pemahaman tentang budaya dan tradisi Methodist dapat memicu prasangka dan stereotip negatif. Hal ini dapat memperkuat penolakan terhadap pembangunan gereja. Perubahan sosial yang cepat dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan ketakutan di masyarakat. Hal ini dapat membuat mereka lebih resisten terhadap perubahan, seperti pembangunan gereja Methodist .

Faktor Politik

Beberapa kelompok politik mungkin memanfaatkan isu pembangunan gereja untuk keuntungan politik mereka. Hal ini dapat memperkeruh suasana dan mempersulit penyelesaian konflik secara damai. Politisi atau tokoh masyarakat tertentu mungkin mengeksploitasi sentimen agama dan ketakutan masyarakat untuk mendapatkan dukungan politik. Hal ini dapat memperburuk ketegangan dan memicu tindakan kekerasan. Lemahnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap kelompok minoritas dapat membuat masyarakat merasa tidak aman dan terancam. Hal ini dapat memperkuat penolakan terhadap pembangunan gereja.

Faktor Ekonomi

Masyarakat mungkin khawatir bahwa pembangunan gereja akan berdampak negatif terhadap ekonomi lokal, seperti hilangnya pekerjaan atau menurunnya nilai properti. Di beberapa daerah, terdapat persaingan ekonomi antar umat beragama. Hal ini dapat memperburuk konflik penolakan pembangunan gereja, terutama jika dikaitkan dengan faktor agama dan sosial. Ketimpangan ekonomi

antara kelompok mayoritas dan minoritas dapat memperkuat penolakan terhadap pembangunan gereja. Masyarakat minoritas mungkin merasa bahwa mereka tidak mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang ekonomi (Firdaus, [2017](#)).

Dampak Konflik Penolakan Pembangunan Gereja Methodist

Penolakan pembangunan Gereja Methodist di berbagai daerah di Indonesia telah memicu berbagai konflik dan polemik yang kompleks. Konflik ini tidak hanya berdampak pada pihak-pihak yang terlibat secara langsung, seperti jemaat Methodist dan kelompok penolak, tetapi juga pada masyarakat luas dan tatanan sosial-politik bangsa. Berikut adalah analisis mendalam tentang dampak konflik penolakan pembangunan Gereja Methodist, beserta daftar pustakanya:

Dampak Sosial

Konflik ini dapat memicu ketegangan dan perpecahan dalam masyarakat, terutama di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama dan memicu sentimen negatif terhadap kelompok minoritas. Penolakan pembangunan gereja dapat dilihat sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk beribadah dan memeluk agama. Hal ini dapat berdampak pada rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jemaat Methodist dan kelompok minoritas lainnya dapat mengalami stigmatisasi dan diskriminasi akibat konflik ini. Hal ini dapat berakibat pada berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Konflik ini dapat menimbulkan trauma dan ketakutan bagi jemaat Methodist dan kelompok minoritas lainnya. Hal ini dapat berakibat pada kesehatan mental dan psikologis mereka.

Dampak Politik

Konflik ini dapat memicu rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama dalam hal penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Konflik ini dapat memperparah ketegangan politik dan memperburuk polarisasi di masyarakat. Hal ini dapat berakibat pada stabilitas politik dan keamanan nasional. Konflik ini dapat melemahkan demokrasi dan nilai-nilai toleransi di Indonesia. Hal ini dapat berakibat pada kemunduran dalam pembangunan bangsa (Aritonang, [2019](#)).

Upaya Penyelesaian Konflik

Dalam menyelesaikan konflik, terdapat berbagai proses yang bertujuan untuk mengakhiri atau mengurangi konflik, yang dikenal sebagai resolusi konflik. Resolusi konflik merupakan usaha untuk menangani konflik dengan komunikasi antar personal oleh pihak-pihak yang terlibat guna mencapai kesepakatan yang memuaskan. Mediasi, pada dasarnya, adalah proses penyelesaian konflik oleh pihak ketiga yang netral dan dilakukan secara sukarela. Keterlibatan orang ketiga yang diterima oleh kedua belah pihak diharapkan dapat membantu menyelesaikan konflik dengan damai. Dalam konflik pembangunan Gereja Methodist, peran mediator dipegang oleh lurah, camat, FKUB, Kemenag, dan Pemerintah Labuhanbatu (Nugroho, [2019](#)).

Berdasarkan empat model mediasi, penulis menganggap bahwa mediasi yang digunakan dalam konflik pembangunan Gereja Methodist adalah *evaluative mediation*. Hal ini karena mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai dan konflik tersebut akhirnya diselesaikan melalui pengadilan. Dalam menangani Konflik Gereja Methodist, melalui Kemenag, FKUB, dan instansi terkait lainnya, melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika terdapat perselisihan dalam rencana pendirian rumah ibadah, hal ini juga diatur dalam PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006 (Arifin, [2020](#)).

Dalam penyelesaian konflik ini, Kemenag dan FKUB memiliki peranan penting untuk menyelesaikan permasalahan ini karena berkaitan dengan kerukunan umat beragama di Pematang Seleng. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kemenag dan FKUB dalam menyelesaikan konflik penolakan pembangunan Gereja Methodist ini antara lain: (1) berperan sebagai mediator; (2) melakukan pertemuan dengan pemuka agama; (3) melakukan pengecekan terhadap warga yang menandatangani izin pembangunan Gereja. Sebagai mediator, Kemenag, FKUB, Lurah, dan Kades Pematang Seleng, penulis merekomendasikan penyelesaian melalui pengadilan. Namun, sebelum menyarankan hal tersebut, Kemenag dan FKUB telah mencoba berdialog dengan para pemuka agama melalui musyawarah terlebih dahulu.

SIMPULAN

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, penelitian ini menunjukkan pentingnya memahami akar-akar konflik agama dalam konteks lokal. Kedua, penelitian ini menyoroti perlunya pendekatan yang komprehensif untuk menyelesaikan konflik agama, yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Ketiga, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang peran sosiologi dalam menganalisis dan menyelesaikan konflik agama. Konflik penolakan pembangunan gereja Methodist di Desa Pematang Seleng merupakan contoh kompleksitas hubungan antar umat beragama di Indonesia. Konflik ini menunjukkan bahwa pembangunan tempat ibadah tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, penting untuk membangun dialog dan komunikasi yang baik antar umat beragama serta melibatkan semua pihak terkait dalam proses pembangunan tempat ibadah.

REFERENSI

- Arifin, E. (2020). *Toleransi dan Keragaman Agama di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Pustaka Belajar.
- Aritonang, A. (2019). Peran Sosiologis Gereja Dalam Relasi Kehidupan Antar Umat Beragama Indonesia. *Jurnal TeDeum*, 9(1), 69–101.
- Bafadhal, O. M., Saraswaty, E., & Handoko, A. I. (2024). Konflik dan wacana media dalam pembangunan gereja di Palembang: analisis jaringan dikursus. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 8(1), 217–226. <https://doi.org/10.25139/jsk.v8i1.6257>
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Pustaka Pelajar.
- Dahlan, B., & Aslamiyah, R. (2022). Problematika Pendirian Rumah Ibadat Umat Minoritas di Kalimantan Selatan. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 21(1), 61. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v21i1.6246>
- Firdaus. (2017). Konflik Pembangunan Rumah Ibadah Di Desa Punt Kayu Kecamatan Batang Pranap Kabupaten Indragirihulu. *JOM FISIP*, 4(2), 1–15.
- Firdaus, R., Nurbaiti, N., Halim, A., & Mubarak, Z. (2023). Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah: Studi Kasus Konflik Gereja Methodist Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 22(1), 17–30. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v22i1.9416>
- Ilmi, G. H. U., Jalil, A., & Suparno, S. (2023). Konflik Pembangunan Rumah Ibadah Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Masyarakat (Studi Kasus Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang). *Diponegoro Law Journal*, 12(4). <https://doi.org/10.14710/DLJ.2023.41192>
- Kahmad, D. (2009). *Sosiologi Agama* (Cet-5). Remaja Rosdakarya.
- Kodiran, M. (2016). Asimilasi Etnis Tionghoa Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Integrasi Nasional (Studi Di Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara). In *Jurnal Ketahanan Nasional* (Vol. 17, Issue 1, pp. 19–29).
- Liliweri, A. (2005). *Prasangka & Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. LKIS.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, Inc.
- Nugroho, J. (2019). *Resolusi Konflik*. Pustaka Cendekia.
- Patton, M. Q. (2022). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Putri, R., & Sari, D. (2023). Peran Media Sosial dalam Memperparah Konflik Penolakan Pembangunan Gereja Methodist: Studi Kasus di Kabupate Y. *Jurnal Komunikasi Massa*, 2, 185–202.

- Raharjo, S., & Susanto, A. (2022). Strategi Mediasi Konflik Penolakan Pemangunan Gereja Methodist: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Kajian Konflik Dan Perdamaian*, 2(14), 221–240.
- Riansyah, A., Mulyani, M., AL-Giffari, M. F., Akbar, S. F., & Hulailah, S. (2021). Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat di Kota Cilegon. *Ijd-Demos*, 3(1), 43–52. <https://doi.org/10.37950/ijid.v3i1.79>
- Rochajat, R. (2011). Konsep Pembangunan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53, 1689–1699.
- Setiawan, A., & Wijaya, B. (2024). Dinamika Konflik Penolakan Pembangunan Gereja Methodist di Desa X: Analisis Sosiologi. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 1(25), 1–20.
- Sulaiman. (2015). Problematika Pendirian Rumah Ibadat di Pati Jawa Tengah. *Analisa Journal of Social Science and Religion*, 22(2), 187–198.
- Suryawati, N., & Syaputri, M. D. (2022). Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 433–446. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.433-446>
- Susanto, S. A. (1979). *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Binacipta.
- Wijayanto, W. S. (2021). Analisis Penanganan Konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari Semarang. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(1), 68–85. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v4i1.11968>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6 th). SAGE Publications.